

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1).

Untuk mengembangkan potensi diri dari segi formal haruslah ditempuh melalui pendidikan. Pada prosesnya dalam lembaga pendidikan diperlukan komponen-komponen sebagai penunjang pembelajaran. Komponen-komponen tersebut seperti keprofesionalan guru, motivasi siswa untuk belajar, sarana prasarana yang mendukung dan tak lepas juga biaya sebagai sumber pengadaan penyelenggaraan pendidikan.

Fattah (2012:112) mendefinisikan bahwa biaya pendidikan merupakan sejumlah uang yang diterima dan dikeluarkan untuk berbagai penyelenggaraan sekolah. Penyelenggaraan sekolah tersebut mencakup gaji dan peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana kelas, perbaikan kelas, pengadaan perlengkapan pelajaran atau media belajar, pengadaan buku pelajaran, alat tulis sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan sekolah dan pengawasan terhadap pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah. Semua komponen pembiayaan tersebut diselenggarakan dalam RAPBS selama periode anggaran.

Pembiayaan merupakan sumber daya yang menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sekolah harus mampu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan sekolah atau madrasah, komponen pembiayaan

merupakan potensi yang sangat menentukan dalam terlaksananya proses belajar mengajar serta dalam kajian manajemen pendidikan pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan (Mulyasa, 2011:47).

Salah satu komponen bermutu atau tidaknya pendidikan dapat diukur dari pembiayaan. Komponen pembiayaan sangatlah penting dalam penyelenggaraan suatu lembaga pendidikan. Pendidikan dapat mencapai tujuannya manakala visi, misi dan tujuan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang mendukung sebagai penunjangnya. Dalam pelaksanaan tersebut tentulah sumber dana yang diperoleh harus dikelola dengan optimal.

Tercapai tidaknya tujuan pendidikan merupakan pengaruh komponen strategi dalam pembiayaan pendidikan dari segi konteks sistem pendidikan di Indonesia. Berkualitas atau tidaknya praktek pendidikan salahsatunya dipengaruhi komponen pembiayaan. Komponen pembiayaan pendidikan dapat dikatakan sebagai peranan yang sangat penting mengingat aspek lain dalam pelaksanaan proses pendidikan pasti tidak terlepas atau ada sangkut pautnya dengan pembiayaan (Musthafa, 2017:224).

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik merupakan tujuan dari manajemen pembiayaan. Dalam mencapai mutu sekolah tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan yang matang, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Hal yang perlu adanya perhatian utama dalam setiap tahapan proses pembiayaan yaitu terkait pencapaian visi dan misi sekolah (Azhari dan Kurniady, 2016:27).

Komponen esensial yang selalu terpaut dengan penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran adalah pembiayaan pendidikan. Sumber daya manusia dapat dibentuk dan dikembangkan melalui penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan penggunaan anggaran tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tepat dan berhasil guna. Kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan keuangan dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan dan skala prioritas yang merupakan salah satu kunci

keberhasilan dalam pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan pengelolaan pembiayaan (Ferdinandi, 2013:566).

Manajemen biaya merupakan suatu aktivitas dalam pengelolaan pembiayaan yang berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengambilan keputusan untuk pelaksanaan, dan alat pengawasan. Harapannya dalam aktivitas yang dijalankan tersebut dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini tidak hanya berlaku baik bagi lembaga yang bersifat profit namun berlaku juga bagi lembaga non profit (Munir, 2013:227).

Untuk memberikan catatan yang akurat tentang persediaan dan aset yang digunakan diperlukannya informasi manajemen biaya. Informasi manajemen biaya dapat berkaitan dengan sistem layanan proses belajar mengajar yang layak untuk suatu layanan yang lebih baik. Hal ini dilakukan upaya mendukung keputusan dengan program yang harus dilakukan dan menjadi pelaporan biaya secara baik dan benar sebagai wujud pertanggungjawaban dari manajemen pembiayaan atas pelaksanaan program (Pasrizal, 2014:14).

Biaya dalam penyelenggaraan pendidikan beragam jenisnya. Pembelajaran membutuhkan biaya dan aspek penunjang pembelajaran pun sama halnya. Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan upaya suksesnya pelaksanaan program pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, para pemilik yayasan, kepala sekolah, atau pihak yang turut serta terlibat dalam penganggaran dan pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan program belajar mengajar seperti dalam pembelian alat-alat belajar atau alat tulis sekolah, biaya transportasi, gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya tidak langsung adalah kisaran keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan selama siswa belajar di suatu jenjang pendidikan (Fattah, 2012:23).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat 1 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 49 ayat 3 juga berbunyi “Dana dari pemerintah tersebut berbentuk hibah untuk satuan pendidikan”. Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan “Standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria, batasan pada besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun”.

Dengan payung hukum di atas, maka tanggung jawab dalam sumber pembiayaan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Maksud dari masyarakat kita dapat pahami bahwa sumber dana bisa berupa dana hibah, infak atau wakaf yang disalurkan guna kebutuhan satuan pendidikan pada proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam penggunaan keuangan tidak semata-mata mengeluarkan ketika ada kebutuhan tapi penggunaan atau pengeluaran haruslah mengikuti standar pembiayaan guna terkurnya nilai yang semestinya keluar dengan besarnya operasional yang didapat. Standar pembiayaan juga menjadi rujukan dalam penggunaan dana dengan sebelumnya menganalisa kebutuhan.

Setiap tahun sekolah harus membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sudah mengalokasikan dari sumber pembiayaan. Sekolah dapat dikatakan baik dari sudut pandang biaya yaitu jika persentase penerimaan dana masyarakat dan usaha lebih besar dari persentase penerimaan bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sekolah yang menjamin ketersediaan atas biaya penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk tujuan dari manajemen pembiayaan sekolah (Idris, 2010:100).

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama yang didalamnya ada yang bertindak sebagai pendidik dan sentral figurnya yaitu kiai, atau tuan guru dan adanya santri, asrama, ruang belajar, dan masjid sebagai sentralnya. Pelaksanaan pembelajarannya yaitu ajaran-ajaran Islam yang harus dilaksanakan dengan disertai pengamalan ajaran-ajaran Islam pada sikap sehari-hari santri (Alwi, 2013:207).

Pesantren muncul menjadi sebuah institusi yang memiliki berbagai kelengkapan pada fasilitas membangun potensi-potensi santri yang tidak harus

dalam material. Ciri khas pesantren biasanya tetap mempertahankan sistem bandongan dan sorogan melalui kajian kitab kuning. Pesantren juga mengadopsi sistem klasikal formal seperti yang terdapat pada madrasah atau sekolah umum namun biasanya masih mempertahankan keaslian kurikulum yang sudah ada atau di zaman saat ini pengadopsian tersebut merupakan integrasi kurikulum pesantren dan kurikulum sekolah (Hasyim, 2015:58).

Salah satu substansi manajemen pesantren adalah manajemen pembiayaan yang akan turut menentukan terhadap jalannya proses pembelajaran di pesantren. Sebagaimana substansi manajemen pada umumnya, manajemen pembiayaan dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam operasionalnya pesantren memerlukan dan tidak terlepas dari masalah biaya (Muhtar dkk, 2016:580).

Sebagai institusi pendidikan dengan sistem berasrama, maka terdapat komponen pendidikan integrasi dari Dinas Pendidikan dan khas Pesantren. Dalam pembelajaran memadukan dua kurikulum, sehingga bobot belajar siswa bertambah dan berpengaruh terhadap pembiayaan. Kegiatan kesiswaan yang lebih banyak, fasilitas yang didapat pun sama halnya yang memerlukan pembiayaan. Dalam pengelolaan pembiayaan juga terdapat kekhasan sendiri tergantung kebijakan pimpinan.

Sekolah swasta yang berbasis pesantren dalam hal biaya tak semudah sekolah negeri yang sudah ditanggungjawab karena status kepemilikan pemerintah. Namun sekolah swasta pun dapat mudah dalam pembiayaan jika sekolah swasta itu berkualitas atau berinisiatif dalam hal sumber pembiayaan sekolah. Dengan sekolah yang berkualitas akan program-program yang dijalankan maka meskipun biaya yang dikenakan cukup tinggi namun masyarakat akan tetap menyekolahkan dengan arti tidak menjadi permasalahan perihal biaya.

Salah satu sekolah swasta berbasis pesantren yang berkualitas di Kota Bandung yaitu Sekolah Menengah Pertama Daarut Tauhiid. Sekolah Menengah Pertama Tauhiid terbagi dua yaitu *boarding school* putra dan *boarding school* putri, dan yang menjadi lokasi penelitian penulis yaitu Sekolah Menengah

Pertama Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri. Sekolah Menengah Pertama Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan yayasan Daarut Tauhiid yang didirikan oleh K.H Abdullah Gymnastiar (sering disapa Aa Gym).

Daarut Tauhiid yang mulanya pondok pesantren kini semakin berkembang pada ranah ekonomi, sosial dan pendidikan. Lembaga pendidikan formal yang berdiri tidak hanya SMP tetapi juga TK, SMA, dan SMK. Sekolah-sekolah tersebut berada di sekitaran lingkungan Daarut Tauhiid. Mengingat hal tersebut maka yayasan dituntut untuk membantu dalam proses pendidikan. Pengadaan sekolah dan dalam pelaksanaan proses pendidikan terdapat rekanan atau bekerjasama dengan lembaga yang masih satu yayasan. Hasil dari observasi, Sekolah Menengah Pertama Daarut Tauhiid dilihat dari segi sarana prasarana sangat mendukung, semua itu pasti tak jauh dari adanya pembiayaan yang memadai dan pengelolaan pembiayaan yang baik.

Sekolah yang berada dalam naungan yayasan yang otoritas pembiayaan pun berada di yayasan atas kesepakatan dengan Direktorat Pendidikan dan kepala sekolah. Yayasan Daarut Tauhiid dalam struktur organisasi dibawahnya terdapat direktorat kemudian unit. Begitu hal nya dengan Sekolah Menengah Pertama Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri merupakan unit dari direktorat pendidikan. Kewenangan tersebut diputuskan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sekolah (Wawancara dengan Kepala Tata Usaha pada Tanggal 16 Februari 2019).

Sekolah swasta yang berbasis pesantren dalam hal pembiayaan terdapat perbedaan dengan sekolah negeri, sekolah dibawah naungan yayasan biasanya memiliki kekhasan sendiri dalam memperoleh dan mengelola pembiayaan. Pengadaan Sekolah Menengah Pertama seperti bangunan dan asrama diperoleh melalui aset wakaf yaitu Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Beasiswa juga diselenggarakan untuk mengapresiasi peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu, beasiswa di Sekolah Menengah Pertama diperoleh dari yayasan melalui Daarut Tauhiid atau disingkat DT peduli. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari peserta didik yang tinggal di asrama, sekolah juga bekerjasama dengan CV.BMA



(Berkah Mulya Abadi) yang merupakan lembaga usaha yang menangani makan dan laundry peserta didik serta Koperasi Pondok Pesantren dalam hal perlengkapan belajar dan seragam sekolah. Hal tersebut jarang terjadi di sekolah swasta umum lainnya (Wawancara dengan Kepala Tata Usaha pada Tanggal 16 Februari 2019).

Kegiatan program atau pembiayaan operasional umumnya pada sekolah yang bersistem asrama atau berbasis pesantren sama halnya dengan sekolah pada umumnya. Perbedaannya terdapat pada program atau kegiatan yang terkait dengan keasramaan serta dalam memenuhi kebutuhan peserta didik sehari-hari sehingga tingkat pembiayaan pun menjadi lebih tinggi. Melihat adanya jenis pembiayaan yang cukup banyak bagi sekolah yang berbasis pesantren, maka biaya yang dikenakan pada orang tua siswa pun cukup tinggi. Hal tersebut sudah menjadi keputusan sekolah, direktorat pendidikan dan yayasan guna terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas.

Pembiayaan memang merupakan aspek yang penting dalam pendidikan meski tidak hanya satu-satunya yang diprioritaskan, namun tidak lah dapat disangkal bahwa pendidikan memang memerlukan biaya, apabila tak ada biaya maka tak berjalanlah lembaga pendidikan tersebut dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini maka dibutuhkan pengelolaan pembiayaan yang baik, guna tercapainya tujuan yang ingin dicapai dan bermutunya lembaga pendidikan.

Berdasarkan fenomena hasil pengamatan dan wawancara diatas, bahwa sekolah merupakan pengembangan dari pondok pesantren Daarut Tauhiid. Dalam pengelolaan pembiayaan yang sedikit ada perbedaan dengan sekolah pada umumnya. Penggalan sumber dana selain dari siswa atau orang tua murid juga diperoleh dari pemerintah dan lembaga yang masih satu yayasan. Dirasa masih banyak permasalahan yang perlu untuk dibahas, maka penulis akan membahas **Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren**. Pembiayaan yang dimulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban dalam pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung?
2. Bagaimana perencanaan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung?
4. Bagaimana pengawasan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung?
5. Bagaimana laporan pertanggungjawaban pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengawasan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan di kalangan pendidikan, referensi dalam pengimplementasian mengenai pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren yang dapat dilihat mulai dari kebijakan pembiayaan, perencanaan pembiayaan,



pelaksanaan pembiayaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban pembiayaan pada penyelenggaraan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung.

2. Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren yang dapat dilihat mulai dari kebijakan pembiayaan, perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban pembiayaan pada penyelenggaraan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama berbasis Pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka dalam melakukan penelitian manajemen pembiayaan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren dimulai dari kebijakan pembiayaan itu sendiri. Kebijakan adalah asas yang menjadi garis dasar yang ditentukan oleh pimpinan kepada seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak sebagai pedoman dalam mencapai sasaran yang dituju. Penentuan kebijakan berada dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang berlaku kepada seseorang karena alasan yang dapat diterima (H. A Rusdiana, 2015:32).

Pengertian kebijakan tersebut tentunya masih secara luas dan dapat diimplementasikan dalam pendidikan. Ruang lingkup pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan, salah satu diantaranya ada standar pembiayaan. Dengan adanya standar pembiayaan tersebut jelas lah bahwa lembaga pendidikan dalam menerapkan pelaksanaan harus mengikuti sebagaimana aturan pemerintah, namun dibalik itu sekolah juga harus mampu mengembangkan sehingga keluarlah ketentuan yang harus diikuti oleh *stakeholder* dalam pelaksanaannya.

Fattah (2017:5) menjelaskan bahwa setiap kebijakan pembiayaan akan mempengaruhi dari mana sumber pembiayaan diperoleh dan untuk apa saja pembiayaan tersebut dialokasikan. Oleh karenanya perlu diketahui terlebih dahulu

siapa yang akan dididik, bagaimana cara mendidik, siapa yang akan membiayai dan sistem pemerintahan mana yang mendukung pembiayaan dalam kegiatan.

Faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah biaya pendidikan. Dalam mencapai tujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan pendidikan diperlukan partisipasi masyarakat guna meningkatkan jalannya roda pendidikan. Dengan demikian kelangsungan pembelajaran pendidikan akan berjalan dengan baik (Usman dkk., 2017:236).

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pendidikan, dapat dikatakan jika tidak ada pembiayaan maka proses penyelenggaraan pendidikan tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Pembiayaan sangat lah penting untuk diperhatikan dan dapat menjadi tolok ukur bermutunya lembaga pendidikan. Dalam segala aktivitasnya pengelola pendidikan tentu memerlukan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pengajaran, kegiatan layanan peserta didik, pelaksanaan program, dan kesejahteraan para tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan yang ada. Semua aktivitas itu tidak terlepas akan butuh biaya.

Biaya pendidikan merupakan yang dilakukan satuan pendidikan untuk mendapatkan jasa tanah, tenaga sumber daya manusia, atau modal membeli barang. Selain itu pengeluaran untuk memberi bantuan finansial kepada siswa. Senada dengan Bowen, Thomas menjelaskan bahwa biaya adalah besarnya pengeluaran dalam bentuk uang yang digunakan untuk kesejahteraan guru, pembelian buku, pemeliharaan gedung dan tanah serta keperluan lainnya (Haryati, 2011:66).

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala bentuk tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain

sebagainya. Lebih lanjut, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan selama pada jenjang pendidikan yang ditempuh (Ferdin, 2013:569).

Jahari dan Syarbini (2013:76) menjelaskan bahwa manajemen memiliki tiga tahap pelaksanaan dan tahap penilaian. Ketiga tahapan tersebut apabila diimplementasikan pada manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgetting*), pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*).

Tahapan di atas berlaku bagi dunia usaha, perkantoran juga pendidikan baik itu sekolah atau madrasah. Mengenai perencanaan bisa dimulai dari sumber yang diperoleh lanjut menganalisa kebutuhan lalu pelaksanaan sebagaimana perencanaan dan tahap selanjutnya yaitu pengawasan baik dari internal atau eksternal hingga beresnya laporan pembiayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kiat mencapai tujuan pendidikan bermutu dapat melalui pembiayaan sekolah dengan perencanaan yang disertai strategi. Strategi pembiayaan sekolah merupakan upaya terselenggaranya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat yang dapat mempengaruhi mutu sekolah. Dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut perlu diketahui, disadari, dan ditinjau ulang akan perencanaan strategi pembiayaan sekolah oleh pihak-pihak berwenang yang akan membawa perubahan positif bagi keberlangsungan dan pencapaian tujuan sekolah (Margareta dan Ismanto, 2017:203).

Perencanaan pembiayaan pendidikan biasanya dilakukan pada awal tahun meski dana anggaran yang diberikan belum turun. Prioritas yang dilakukan dalam perencanaan pembiayaan adalah hal yang sangat diperlukan dan mendesak. Sumber dana perlu dikelola berdasarkan standar yang telah dibebankan atau ditetapkan sekolah sebagai ujung tombak pengelolaan pendidikan (Asfia dkk., 2015:126).

Suatu instrumen dirancang untuk memfasilitasi perencanaan dalam anggaran. Anggaran memberikan sebuah konteks proses perencanaan pemilihan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam menganggarkan dana sebelumnya perlu diketahui ruang lingkup pembiayaan pendidikan supaya dalam pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan. Penentuan biaya ini akan mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan dalam suatu lembaga yang akan mencapai pada suatu tujuan tertentu.

Perencanaan dihimpun untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan, misalnya sumber daya yang berkaitan dengan anggaran. Beberapa aspek pembiayaan yang perlu untuk dipahami yaitu konsep merencanakan anggaran, mengklasifikasikan kegiatan, menentukan standarisasi, menentukan biaya satuan dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan. Mekanisme penganggaran terbagi untuk penganggaran rutin yaitu untuk membiayai kegiatan pendidikan bersifat rutin, dan mekanisme penganggaran untuk membiayai kegiatan pendidikan bersifat investasi (Susiana dkk., 2016:10).

Fattah (2012:47) menjelaskan bahwa *budgetting* atau penganggaran merupakan kegiatan menyusun anggaran. *Budget* dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk jumlah uang yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga dalam periode tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Disamping sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran dikatakan pula alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga yang menempatkan organisasi. Anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolok ukur berhasilnya suatu lembaga dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran juga dijadikan sebagai alat mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dalam bertugas (Fattah, 2012:49).

Menyusun RAPBS perlu menganalisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Menyusun RAPBS penting untuk memerhatikan berbagai peluang pembiayaan pendidikan. Strategi pembiayaan

pendidikan dalam menyusun RAPBS dimulai dengan mengkaji perubahan peraturan perundang-undangan, tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang mungkin membuka peluang, dalam hubungan ini pemberian kewenangan kepala sekolah untuk mengelola keuangan sekolah yang menjadi tanggung jawab dapat menjadi sangat strategis (Fattah, 2012:55).

Setelah adanya perencanaan maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan sebagaimana rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran baik berupa uang secara langsung ataupun barang atau aset yang dapat diuangkan. Segala bentuk yang terjadi, tidak luput harus ada catatan sebagai bukti untuk laporan pertanggungjawaban.

*Accounting* didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan dalam pembukuan data keuangan suatu organisasi atau lembaga. Akuntansi memiliki peran dan fungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan supaya berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan (Masditou, 2017:137).

Pembukuan merupakan kegiatan pengurusan keuangan yang dilakukan tiap hari, setiap pengeluarannya dicatat sehingga memudahkan pada laporan tiap akhir bulan atau akhir triwulan. Pengurusan ini meliputi dua hal: *pertama*, pengurusan yang menyangkut kewenangan dalam menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang atau yang disebut pengurusan ketatausahaan. *Kedua*, menyangkut urusan menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang yang dalam pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan yang dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendahara dalam tugasnya melakukan pembukuan serta mengontrol keuangan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran pembiayaan sehingga transferisasi keuangan terorganisir jelas (Sonedi dkk., 2017:32).

Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik yaitu memiliki sumber dana yang memadai, dan berkelanjutan. Sumber dana pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dari pajak, APBN, APBD, kontributor. Merujuk pada PP No. 48 Tahun 2008, maka sumber pendanaan pendidikan diperoleh dari Anggaran

Pemerintah Pusat atau (APBN), Anggaran Pemerintah Daerah atau (APBD), dan dari masyarakat (orang tua/ wali siswa maupun dari orang lain berbentuk hibah). Untuk madrasah atau sekolah yang berbasis Islam dalam pengadaan sumber dana dapat memanfaatkan potensi ekonomi umat berupa zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf (Zulfa, 2016:137).

Model pembiayaan pendidikan telah lama dikembangkan oleh para ahli teori pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara merata dan adil. Selain model pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan perlu memerhatikan struktur biaya pendidikan. Struktur biaya pendidikan terdiri dari: biaya satuan pendidikan, biaya personal, dan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (Fattah, 2017:35).

Pelaksanaan yang terjadi perlu adanya peganwasan sebagai kegiatan memperhatikan, memeriksa terhadap pelaksanaan manajemen pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung. Pengawasan pembiayaan biasanya dilakukan oleh kepala sekolah sebagai otorisator, dan bendahara sebagai ordonator. Pengawasan tersebut terjadi pada tingkat unit, adapun tahapan selanjutnya yang dilakukan sekolah yaitu pengawasan di lembaga atau direktorat pendidikan kemudian yayasan.

Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu memantau (*monitoring*), menilai, dan melaporkan hasil temuan kegiatan. Memantau dilakukan terhadap kinerja aktual, baik dalam proses maupun hasil dari perencanaan dan pelaksanaan. Aktivitas yang sedang dan telah dilaksanakan diukur berdasarkan standar yang telah ditentukan. Hasilnya apakah terjadi penyimpangan atau tidak, jika terdapat penyimpangan maka diusahakan adanya perbaikan yang direkomendasikan kepada pimpinan evaluasi untuk terlaksananya proses pembiayaan yang lebih baik di masa selanjutnya (Fattah, 2012:66).

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan secara sistemik dan sistematis. Secara sistemik yaitu pengawasan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan



mencakup semua kegiatan. Secara sistematis berarti kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan secara berurutan, mulai dari kegiatan memonitor, memeriksa dan menilai sampai pada pemberian laporan penggunaan anggaran kepada pihak berwenang guna menyiapkan pembuatan kebijakan lebih lanjut (Susiana, dkk., 2016:12).

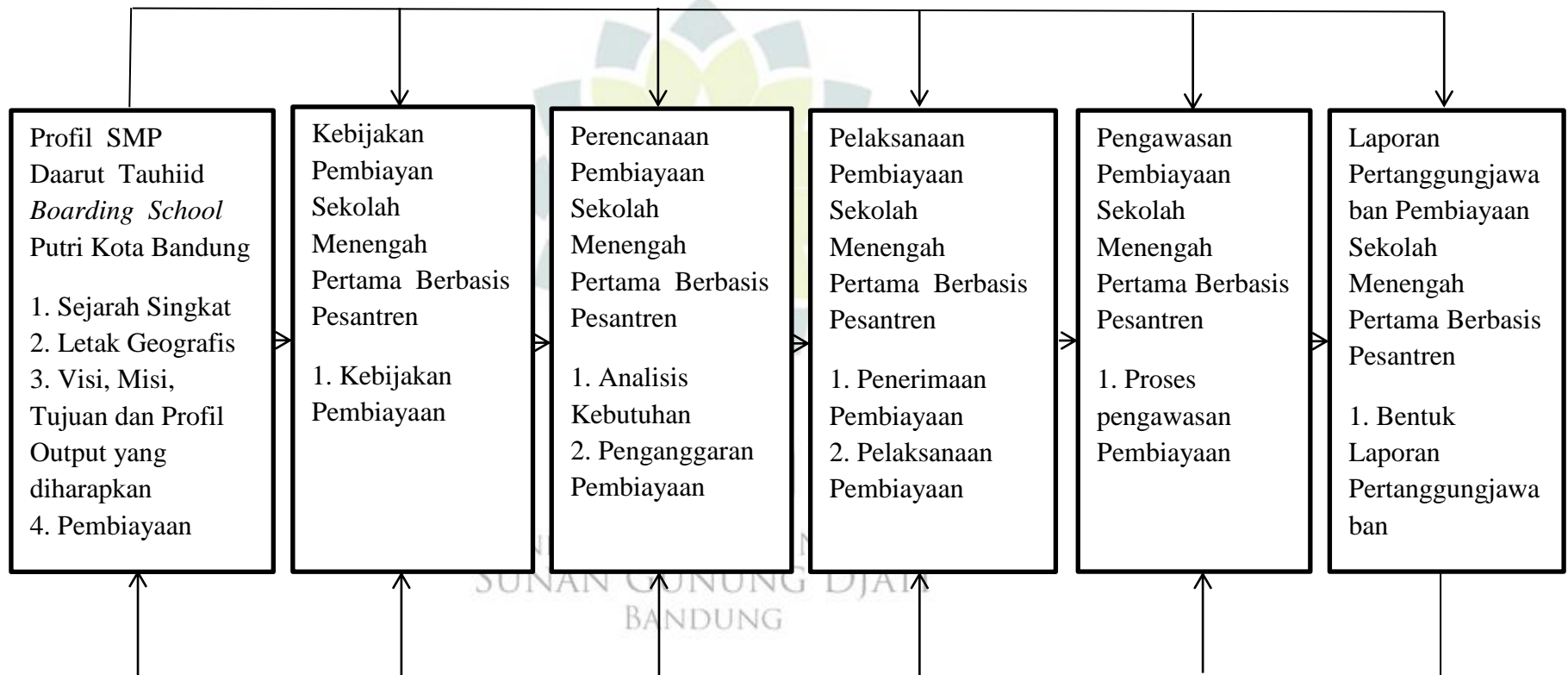
Kegiatan pertanggungjawaban dilakukan sebagai hasil dari adanya penerimaan, penggunaan, dan pengeluaran yang dilakukan bendaharawan untuk kepentingan sekolah dan seluruh warga sekolah. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban lahirlah produk pembiayaan dan penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan dan juga sebagai pembanding atas laporan yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi acuan yang akan datang.



## SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

### MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS PESANTREN

(Penelitian di Sekolah Menengah Pertama Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung)



## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi atas nama Muthmainah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN MADRASAH DI MTsN 2 BANDUNG” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) pengelolaan pembiayaan di MTsN 2 Bandung; (2) pengelolaan administratif dan (3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiayaan di MTsN 2 Bandung.
2. Skripsi atas nama Ummi Hanifah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN MADRASAH (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Persis 30 Cibedug Kabupaten Bandung)” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Sumber-sumber pembiayaan di MTs Persis 30 Cibedug Kabupaten Bandung; (2) Pengelolaan pembiayaan di MTs Persis 30 Cibedug Kabupaten Bandung; dan (3) Keberhasilan pembiayaan Madrasah di MTs Persis 30 Cibedug Kabupaten Bandung.
3. Skripsi atas nama Muhammad Anis, Universitas Negeri Semarang, 2013, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SDIT ASSALAMAH UNGGARAN” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDIT Assalamah Unggaran, dan (2) Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di SDIT Assalamah Unggaran.
4. Skripsi atas nama Wahidin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, dengan judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN NURUL HIJRAH JAKARTA TIMUR” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Implementasi manajemen keuangan pendidikan di pondok pesantren Nurul Hijrah Jakarta, (2) Faktor hambatan keuangan dalam manajemen keuangan di pondok pesantren Nurul Hijrah Jakarta dan (3) Cara mengatasi hambatan dalam manajemen keuangan di pondok pesantren Nurul Hijrah Jakarta.
5. Skripsi atas nama Aris Nurjaman, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN

PENDIDIKAN BERBASIS ZAKAT (Penelitian di SMP Juara Kota Bandung)” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Sumber pembiayaan di SMP Juara Kota Bandung yang bersumber dari zakat yang berada dibawah binaan Rumah Zakat; (2) Konsep manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung; dan (3) Keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan pembiayaan pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung.

6. Jurnal atas nama Luqman Al-Hakim Musthafa, 2017, dengan judul “MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH SWASTA (Studi di Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut)”, isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Jenis pembiayaan pendidikan, (2) Model pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut, (3) Sumber dana Pendidikan Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat.
7. Jurnal atas nama Ulpha Lisni Ahari dan Dedy Achmad Kurniady, 2016, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, FASILITAS PEMBELAJARAN, DAN MUTU SEKOLAH” isi pokonya adalah mendeskripsikan; (1) Manajemen pembiayaan pendidikan, (2) Fasilitas pendidikan, (3) Mutu sekolah, (4) Pengaruh manajemen pembiayaan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah.
8. Jurnal atas nama Ferdi W.P, 2013, dengan judul “PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: SUATU KAJIAN TEORITIS FINANCING OF EDUCATION: A THEORITICAL STUDY” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Teori ekonomi pendidikan, (2) Jenis pembiayaan pendidikan, (3) Analisis biaya pendidikan, (4) Kondisi pembiayaan pendidikan, (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan.
9. Jurnal atas nama Ahmad Munir, 2013 dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Manajemen pembiayaan pendidikan, (2) Sejarah pembiayaan pendidikan islam, (3) Problem pembiayaan

pendidikan islam di Indonesia, (4) Solusi perbaikan pengelolaan pembiayaan pendidikan.

10. Jurnal atas nama Himyar Pasrizal, 2014, dengan judul “MANAJEMEN BIAYA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN”, isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Konsep biaya pendidikan, (2) Manajemen biaya pendidikan, (3) Biaya pendidikan sekolah.
11. Jurnal atas nama Ridwan Idris, 2010, dengan judul “APBN PENDIDIKAN DAN MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Anggaran dan kebijakan pendidikan Indonesia, (2) Biaya pendidikan yang masih mahal, (3) Masalah pembiayaan. .
12. Jurnal atas nama Ainul Mardiyash, 2017, dengan judul “PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 19 PERCONTOHAN BANDA ACEH” isi pokoknya adalah (1) Pembiayaan, (2) Pengelolaan pembiayaan di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh.
13. Jurnal atas nama Sri Haryati, 2011, dengan judul “PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) DI KOTA MAGELANG”, isi pokoknya adalah (1) Biaya operasional satuan pendidikan, (2) Model pengelolaan pembiayaan, (3) Hasil pengembangan model manajemen pembiayaan, (4) Keefektifan model penghitungan biaya operasional satuan pendidikan.
14. Jurnal atas nama Susiana, Darwin, dan Arif Rahman, 2016, dengan judul “POLA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA” isi pokoknya adalah mendeskripsikan; (1) Konsep pembiayaan, (2) Sumber-sumber pembiayaan, (3) Model pengelolaan pembiayaan.
15. Jurnal atas nama Masditou, 2016, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN YANG BERMUTU” isi pokoknya adalah (1) Jenis pembiayaan, (2) Prinsip-prinsip pembiayaan, (3) Sumber-sumber pembiayaan, (4) Pengelolaan pembiayaan.
16. Jurnal atas nama Umi Zulfa, 2013, dengan judul “MEMBANGUN MADRASAH BERMUTU MELALUI PRAKTIK MANAJEMEN

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS POTENSI UMAT (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)” isi pokoknya adalah (1) Konsep Madrasah bermutu, (2) Sumber pembiayaan zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf.

17. Jurnal atas nama Sonedi, Zulfa Jamalie, dan Majeri, 2017, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERSUMBER DARI MASYARAKAT” isi pokoknya adalah (1) Perencanaan pembiayaan, (2) Pelaksanaan pembiayaan, (3) Merealisasikan anggaran, (4) Pengawasan pembiayaan pendidikan.
18. Jurnal atas nama Umi Zulfa, 2016, dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN MADRSAH EFEKTIF MELALUI PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRSAH BERBASIS ZISWA–SCHOOL LEVY” isi pokoknya adalah mendeskripsikan (1) Konsep manajemen pembiayaan pendidikan, (2) Model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWA.
19. Jurnal atas nama Ririn Tius Eka Margareta dan Bambang Ismanto, 2017, dengan judul “STRATEGI PERENCANAAN PEMBIAYAAN SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU DI SMP NEGERI” isi pokoknya adalah mendeskripsikan (1) Strategi perencanaan pembiayaan sekolah dengan menggunakan Analisis SWOT, (2) Faktor internal dan faktor eksternal pembiayaan sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga.
20. Jurnal atas nama Asfia, Murniati dan Nasir Usman, 2015, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN PADA MTsN JANARATA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH” isi pokonya adalah mendeskripsikan (1) Manajemen pembiayaan, (2) Pembiayaan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
21. Jurnal atas nama B. Marjani Alwi, 2013, dengan judul “PONDOK PESANTREN: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya” isi pokoknya adalah mendeskripsikan (1) Ciri khas pondok pesantren, (2) Perkembangan pondok pesantren dan (3) Sistem Pondok Pesantren.



22. Jurnal atas nama Husmiaty Hasyim, 2015, dengan judul “TRANSFORMASI PENDIDIK ISLAM (KONTEKS PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN) isi pokoknya adalah mendeskripsikan (1) Jenis dan komponen pondok pesantren, (2) Komponen-komponen pendidikan.
23. Jural atas nama Zusba Muhtar, Syarifuddin Ondeng, dan Moh. Wayong. 2016, dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN OPERASIONAL PESANTREN TAHFIZUL QURAN IMAM AL-SYAATIBI BONTOABADDO GOWA” isi pokoknya adalah mendeskripsikan (1) Manajemen Keuangan Pendidikan, (2) Pengelolaan biaya Pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Syaatabi Bontoabaddo Gowa.

Peneliti Muthmainah memfokuskan kepada pelaksanaan pembiayaan Madrasah dari segi pengelolaan pembiayaan dan pengelolaan administratif atau arsip-arsip yang digunakan, selaras dengan Umami Hanifah memfokuskan kepada sumber-sumber dana yang diperoleh, implementasi pembiayaan dan pengaruh dalam pembiayaan terhadap bidang kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana. Adapun Muhammad Anis lebih kepada pengelolaan pembiayaan yang disertai dengan proses pemeriksaan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dan Wahidin memfokuskan pada implementasi manajemen keuangan pendidikan, hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam manajemen keuangan serta Aris Nurjaman yang hasil penelitiannya di SMP Juara Kota Bandung memfokuskan pada pembiayaan bersumber dari zakat yang dibawah binaan Rumah Zakat.

Berdasarkan hasil yang relevan dan bedanya diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan yakni dapat berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan. Adapun perbedaan dengan beberapa penelitian di atas yaitu pada penelitian ini pembiayaan sekolah yang merupakan sekolah berbasis pesantren Daarut Tauhiid *Boarding School* Putri Kota Bandung. Sumber pembiayaan pun diperoleh dari orang tua siswa dan sebagian dari pemerintah, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti lain adapun kesamaan dengan skripsi yang telah disebutkan ialah dari segi konsep dasar manajemen pembiayaan.